



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
TAHUN 2024**

**KABUPATEN TANAH LAUT
2025**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas Rahmat ALLAH Subhanahu Wata'ala, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RLPPD menyajikan Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Inovasi Daerah yang telah dikembangkan di tahun 2024. RLPPD akan disampaikan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media online, papan pengumuman yang mudah diakses oleh publik dan website resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi. Begitupula segala bentuk masukan dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaihari, Maret 2025

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO



A. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

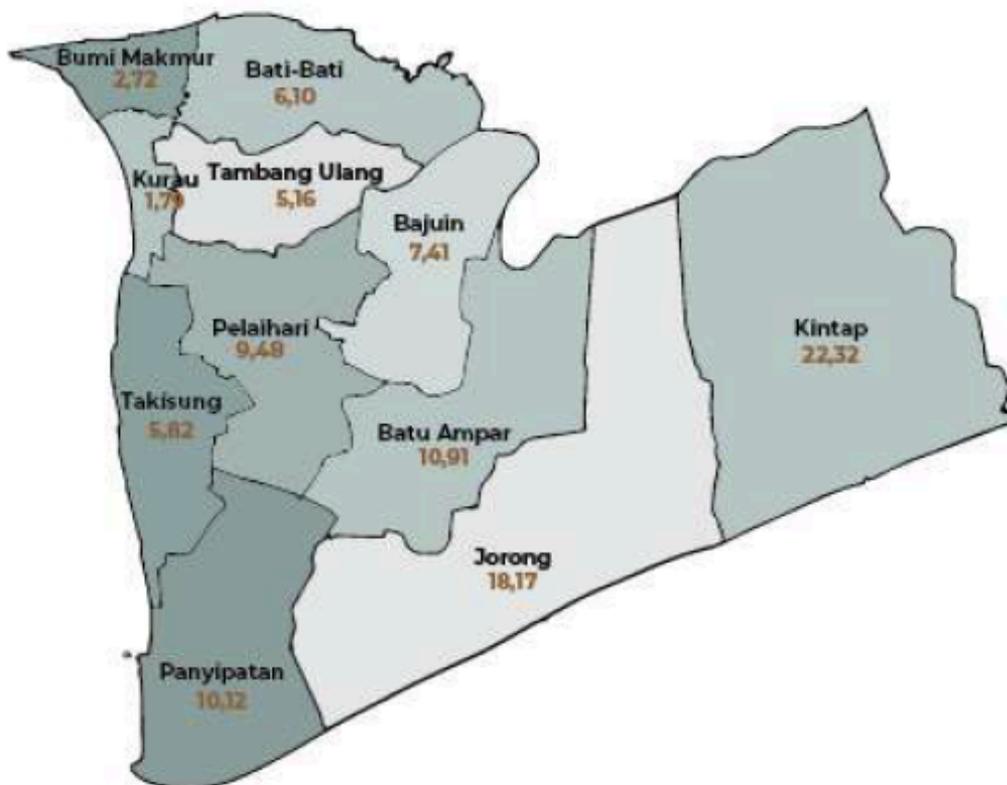
Kabupaten Tanah Laut dengan Ibukota Pelaihari dibatasi : sebelah barat dan sebelah selatan oleh Laut Jawa, sebelah timur oleh Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah utara oleh Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114°30'20" BT - 115°23'31" BT dan 3°30'33" LS - 4°11'38" LS. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.841,37 km² atau hanya 10,34 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022).

Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 km² atau 22,32 % dari Kabupaten Tanah Laut, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 68,70 km² atau hanya 1,79 % dari luas Kabupaten Tanah Laut. Kecamatan Kintap merupakan kecamatan yang terletak paling jauh dari ibukota Kabupaten Tanah Laut.

Curah hujan dan hari hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Februari. Rata-rata suhu tertinggi sebesar 31,30°C terjadi di bulan Oktober, sementara rata-rata suhu terendah pada bulan Januari yaitu 27,40°C.

Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) di Kabupaten Tanah Laut





1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk per-Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	17.430	16.880	34.310
2	Jorong	18.673	17.784	36.457
3	Pelaihari	41.565	41.011	82.576
4	Kurau	7.431	7.334	14.756
5	Bati Bati	23.892	22.997	46.889
6	Panyipatan	13.371	13.069	26.439
7	Kintap	23.115	21.941	45.056
8	Tambang Ulang	9.795	9.523	19.318
9	Batu Ampar	14.880	14.170	29.050
10	Bajuin	10.404	9.982	20.386
11	Bumi Makmur	7.352	7.220	14.572
JUMLAH		187.908	181.910	369.818

Sumber : Data DKB Semester II Tahun 2024

2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Dalam tabel berikut ini disampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayah masing.

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas wilayah (km ²)
1	Panyipatan	Panyipatan	10	388,9009772
2	Takisung	Gunung Makmur	12	223,673557
3	Kurau	Padang Luas	11	68,700448
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	104,656396
5	Bati-Bati	Padang	14	234,24599
6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	198,345405
7	Pelaihari	Pelaihari	20	364,030614
8	Bajuin	Bajuin	9	284,705522
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	419,05388
10	Jorong	Jorong	11	697,842345
11	Kintap	Kintapura	14	857,208419
Jumlah			135	3.841,372348

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2025 (Badan Pusat Statistik)



B. VISI-MISI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Visi dan Misi

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Secara Nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanah Laut akan terdapat masa transisi menjelang Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut berakhir pada tahun 2023.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah (RPJMD), menunggu Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. Di sisi lain, RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.



RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Tanah Laut 2005-2025. RPD periode 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Tanah Laut sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Tanah Laut adalah **“Tanah Laut Sebagai Daerah Industri Dan Pelabuhan Menuju Masyarakat Sejahtera Didasari Nilai-Nilai Agama”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 misi pembangunan Tanah Laut 2005-2025 yakni :

1. Mewujudkan Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Nilai Agama
2. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata
5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Laut Berstandart Internasional
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan
7. Mewujudkan Penyiapan Prasarana Pembangunan Bandara

Berlandaskan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 maka pada RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 menekankan untuk pencapaian SDM yang berkualitas dan berdaya saing, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, dan pariwisata serta pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan.

2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara



bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 adalah sebagaimana table di bawah ini.

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		
	1.1 Meningkatkan layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, PAUD, dan Kesetaraan	Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah yang memadai dan layak guna Melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM
		Meningkatkan jumlah Sekolah yang terakreditasi	Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan
			Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan
	1.2 Meningkatkan layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
			Pencegahan dan Penanggulangan



NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Stunting Terintegrasi
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitas Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif
				Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olahraga
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera	Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
				Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender



NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			
2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan		Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian
				Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
				Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
			Meningkatkan populasi dan produksi peternakan	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak
				Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
				Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.
				Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.
				Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan



NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pengendalian penyakit hewan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
				Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri	Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
				Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
				Melaksanakan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi Sentra IKM
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di perdagangan	Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
				Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.



NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah
		Peningkatan kualitas kinerja Koperasi dan UMKM naik kelas	Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan
	2.4 Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah	Pengembangan pemasaran pariwisata
			Pengembangan destinasi pariwisata prioritas
			Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
	2.5 Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal
			Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta
	2.6 Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten



NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana
				Penyediaan akses dan peningkatan sistem penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan.
			Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan	Penyediaan Infrastruktur persampahan
				Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan
			Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Laut
				Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan
				Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
			Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang



NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				daerah
				Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan
2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup		Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle
			Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah
2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor		Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima bantuan
				Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "GAMIS" (Gerakan Atasi Kemiskinan)
				Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Upaya PEMBERDAYAAN, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS.
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
	2.9 Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat	Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan
	2.10 Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
			Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan
		Meningkatkan Penempatan tenaga kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja
			Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja
		Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan
	2.11 Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	meningkatkan status atau kelas desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3	Meningkatkan Tata Kelola		



NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		
3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.
			Penerapan Satu data Tanah Laut penguatan sistem inovasi daerah
		Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan level Maturitas SPIP
			Peningkatan Level Kapabilitas APIP
			Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah
3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah
3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha
			Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan
			Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan



NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pelayanan publik
			Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja
			Modernisasi/Digitalisasi sistem dan manajemen pelayanan publik
			Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			Peningkatan kualitas e-procurement
			Peningkatan kualitas Layanan pada kecamatan
		Meningkatnya penataan peraturan perundangundangan daerah dan penegakan Perda.	Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	3.4 Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government

Sumber data: RPD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026



C. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,98	73,43	0,617
2	Angka Kemiskinan	3,73	3,74	0,268
3	Angka Pengangguran	3,58	3,43	-4,19
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,78	5,01	4,812
5	Pendapatan Per-Kapita	55872,29	58233,29	4,226
6	Ketimpangan Pendapatan	0,259	0,257	-0,772

Sumber : BPS(Badan Pusat Statistik)

D. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian pelaksanaan kinerja urusan pelayanan dasar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dalam laporan ini memuat capaian kinerja kunci *Outcome* sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut:

1. Urusan Pendidikan

Capaian penyelenggaran Urusan Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 11.281 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 12.736	88,575691
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 35.552 Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 39.588	89,8049914



3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 12.806 Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 20.362	62,8916609
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 4.892 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 6.306	77,5769109

2. Urusan Kesehatan

Capaian penyelenggaraan Urusan Kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 448 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 369.818	1,2114067
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 4 Jumlah RS di kabupaten/kota = 4	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 4.371 Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 6.257	69,8577593
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.053 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 6.215	81,3032985
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4.990 Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 5.916	84,3475321
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25.424 Jumlah balita di kabupaten/kota = 30.045	84,6197371



7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 58.681 Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 59.950	97,883236
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 132.958 Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 243.550	54,591665
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 29.742 Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 33.933	87,6491911
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 25.204 Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 27.962	90,136614
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.287 Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 4.287	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 510. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 510	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3.693 Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 4.679	78,9271212
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 8.257 Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 8.721	94,6795092



3. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 346,27 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 2.227,97	15,5419507
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 100,979 Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 202,92166	49,7625537
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 17.503. Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 22.620	77,3784262
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 68.437 Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 86.988	78,67407
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 71.934 Jumlah rumah di Kabupaten A = 92.004	78,1857311



6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 233 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 233	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 583,48 Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1.058,91	55,1019445
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 20 Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 1.195	1,6736402
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 590 Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 590	100

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Capaian penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Indikator Kinerja Kunci *Outcome* di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

No	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 12 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 12	100
2	Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	NIHIL
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 12,77	11,7630803



	kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 108,56	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 2.358 Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 109.254	2,1582734
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 1.094 Jumlah unit rumah kab/kota = 109.254	1,0013363

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Capaian penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Rumus	Capain (%)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 128 Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 128	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan = 1 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 1	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 364.117 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 364.117	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 1.411 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 364.117	0,3875128
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 3.135 Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 3.135	100



6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 102 Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 102	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15 menit

6. Urusan Sosial

Capaian penyelenggaraan Urusan Sosial berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Outcome di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Rumus	Capain (%)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 2.439 Jumlah Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 3.500	69,6857143
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 6.427 Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 6.427	100

E. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dinilai melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai sumber informasi utama.



Untuk peringkat dan nilai hasil EPPD Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, belum dirilis oleh Tim EPPD Kementrian Dalam Negeri.

2. Laporan Keuangan Pemerintahan daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penghargaan capaian kinerja keuangan yang baik ditandai dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Tanah Laut selama 11 (Sebelas) kali berturut-turut sejak Tahun 2013-2023. Hal ini merupakan pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

F. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.590.022.389.028,58 atau 121,44 % dari anggaran sebesar Rp. 2.132.799.482.448,00 yang terbagi dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.214.600.706.083,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.238.370.595.928,12 atau 111,08 % yang terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	53.010.000.000,00	54.386.407.175,28	102,60
2	Retribusi daerah	85.556.230.626,00	89.609.395.242,78	104,74
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.726.892.282,00	14.726.892.282,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.307.583.175,00	79.647.901.228,06	129,92
Jumlah		214.600.706.083,00	238.370.595.928,12	111,08

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024

(Unaudit)



2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.1.918.174.553.055,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.351.549.111.320,46 atau 122,59% yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.757.800.500.119,00	2.158.167.868.877,00	122,78
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.374.052.936,00	193.381.242.443,46	120,58
Jumlah		1.918.174.553.055,00	2.351.549.111.320,46	122,59

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Unaudit)

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari anggaran sebesar Rp.24.223.310,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.102.681.780,00 atau 423,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	13.550.000,00	90.725.531,00	669,56
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.673.310,00	11.956.249,00	112,02
Jumlah		24.223.310,00	102.681.780,00	423,90

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Unaudit)

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.647.656.496.376,00 atau 91,36 % dari anggaran sebesar Rp.2.897.946.343.634,15 yang terbagi dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.



1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi merupakan kelompok anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.1.795.266.155.214,79 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.641.337.515.767,19 atau 91,43% yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	806.474.360.892,00	759.123.202.346,19	94,13
2	Belanja Barang dan Jasa	881.169.619.555,79	782.104.225.767,00	88,76
3	Belanja Pemeliharaan	157.885.815.300,00	143.562.196.523,00	90,93
4	Belanja Subsidi	1.037.600.000,00	340.000,00	0,03
5	Belanja Hibah	82.277.401.767,00	77.185.307.654,00	93,81
6	Belanja Bantuan Sosial	24.307.173.000,00	22.924.440.000,00	94,31
Jumlah		1.795.266.155.214,79	1.641.337.515.767,19	91,43

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Unaudit)

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.803.019.641.849,36 dapat direalisasikan sebesar Rp.735.358.031.596,81 atau 91,57% yang terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tanah	7.970.837.168,00	4.235.378.448,00	53,14
2	Belanja Peralatan dan Mesin	179.133.928.932,83	164.494.805.888,00	91,83
3	Belanja Bangunan dan Gedung	267.981.345.221,70	250.290.441.490,81	93,40
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	346.734.903.453,83	315.323.294.520,00	90,94
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	222.202.973,00	191.248.000,00	86,07
6	Belanja Aset Lainnya	976.424.100,00	822.863.250,00	84,27
Jumlah		803.019.641.849,36	735.358.031.596,81	91,57

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Unaudit)



3. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.29.219.255.758,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.887.762.000,00 atau 3,04 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tak Terduga	29.219.255.758,00	887.762.000,00	3,04
Jumlah		29.219.255.758,00	887.762.000,00	3,04

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Unaudit)

4. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.270.441.290.812,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.270.073.187.012,00 atau 99,86 % yang terdiri dari Belanja Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	6.071.025.100,00	6.071.025.100,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	264.370.265.712,00	264.002.161.912,00	99,86
Jumlah		270.441.290.812,00	270.073.187.012,00	99,86

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Unaudit)

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp. 864.623.610.237,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 865.186.610.237,06 atau 100,07 % yang terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	864.623.610.237,00	864.623.610.237,06	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	563.000.000,00	0,00
3	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	100
Jumlah		864.623.610.237,00	865.186.610.237,06	100,07

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Unaudit)

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dari anggaran sebesar Rp.0 dapat direalisasikan sebesar Rp.0 atau 0 % yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0
2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0
Jumlah		0,00	0,00	0

Sumber data : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024
(Unaudit)

G. INOVASI DAERAH

Jumlah inovasi yang didaftarkan di Tahun 2023 pada KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada 8 (delapan) Inovasi, yaitu sebagai berikut :



No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Detak (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	2019	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.
2	Dinas Kesehatan	PSC (<i>Public Safety Center</i>) 119 Tanah Laut	2019	Pelayanan ini mempermudah, mempercepat dan tidak menunda pelayanan kepada masyarakat, diantaranya strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Jika dalam kasus gawat darurat sehingga tidak biasa datang ke Puskesmas, maka petugas medis datang kerumah. Yang dimana, untuk program ini masih harus dilengkapi dengan aplikasi dan regulasi agar masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas medis melalui smartphone datang ke rumah atau pelayanan kesehatan On Call.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)	2020	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
4	Bappeda	Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan	2020	Inovasi Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah bentuk inovasi dalam rangka mewujudkan



		Pemkab Tanah Laut		perencanaan yang mengutamakan prioritas dan berdampak secara langsung ke masyarakat sesuai dengan program berorientasi fungsi dan manfaat karena itu perlu suatu orientasi skema perencanaan yang terstruktur untuk menjadi acuan dan arah bagi perencana di lingkungan Pemkab Tanah Laut.
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Simfoni (Sistem Informasi Layanan Online)	2020	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI) adalah inovasi pelayanan administrasi kepegawaian secara online dalam mengurus usul dokumen kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat, Pensiun, Cuti, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pencantuman Kelar, Pembuatan Karis/Karsu, Satya Lencana dan dokumen kepegawaian lainnya.
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sidika (Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian)	2020	Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA) merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola, menyimpan dan mengakses dokumen secara elektronik secara cepat dan tepat.
7	Sekretariat Daerah	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (Sosialita)	2020	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (Sosialita) adalah e-marketplace produk inovasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui UKPBJ Kabupaten Tanah Laut dan masuk kategori toko daring yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi Sosialita ini bertujuan memudahkan dan memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa lainnya sampai dengan lima puluh juta rupiah yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi Sosialita untuk mewujudkan



				pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta mendorong dan mengoptimalkan peran serta UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa lingkup Tanah Laut.
8	Dinas P2KBP3A	Layanan Konseling Kepada Anak Bawah Umur Ingin Nikah (LAYAK KAWIN)	2021	Layanan konseling ini bertujuan untuk dapat mencegah atau mengurangi minat perkawinan dini. Selain itu konseling yang diberikan dapat membuka serta memberikan wawasan bagi calon pasangan perkawinan dini agar dapat berfikir kembali atau memantapkan mental/pemikiran sebelum kawin. Sehingga nantinya jika calon pasangan tetap memutuskan untuk kawin, dapat mengurangi resiko perceraian.

Perbandingan jumlah inovasi di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2021-2024

Tahun	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Inovasi SKPD	13	40	17	45	81

Terdapat peningkatan dari Tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu dengan total jumlah inovasi 183 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

H. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah selama tahun 2024. Dari laporan diatas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas



masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2024, masih perlu untuk ditingkatkan agar tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut dapat dicapai dan ditingkatkan.

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi bahan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam memberikan masukan yang konstruktif guna mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi.